

2025-2029



RENCANA STRATEGIS

BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN NUNUKAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 dapat tersusun. Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan disusun berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada RJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang berisi serangkaian tujuan, dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan. Kami menyadari bahwa Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak.

Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan ini dapat diimplemetasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan.

Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Penyusun Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029 atas



segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Nunukan, 20 September 2025
Kepala Bappeda,

Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670903 199303 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN.....	12
ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	41
TUJUAN,SASARAN,	45
BAB V.....	120
PENUTUP	120

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pembangunan Daerah Adalah usaha yang sistematis yang diselenggarakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan daerah tersebut maka diperlukan Pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin pelaksanaan Pembangunan tersebut berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan Pembangunan daerah. Dalam pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah menghasilkan dokumen rencana Pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD), rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan nasional. Sehingga rencana Pembangunan daerah harus dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan dengan dokumen Pembangunan nasional baik itu jangka Panjang, jangka menengah maupun tahunan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Pembangunan daerah. Selain itu dalam proses perencanaan Pembangunan daerah dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan dibutuhkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pembangunan. Melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu pengetahuan dan teknologi dan pasal 66 dan pasal 67 Peraturan Presiden dan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah dapat membentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah yang memiliki tugas



melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penarapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk memperkuat perencanaan Pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi daerah maka perlu disusun dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan daerah disegala bidang kehidupan yang berpedoman pada Pancasila.

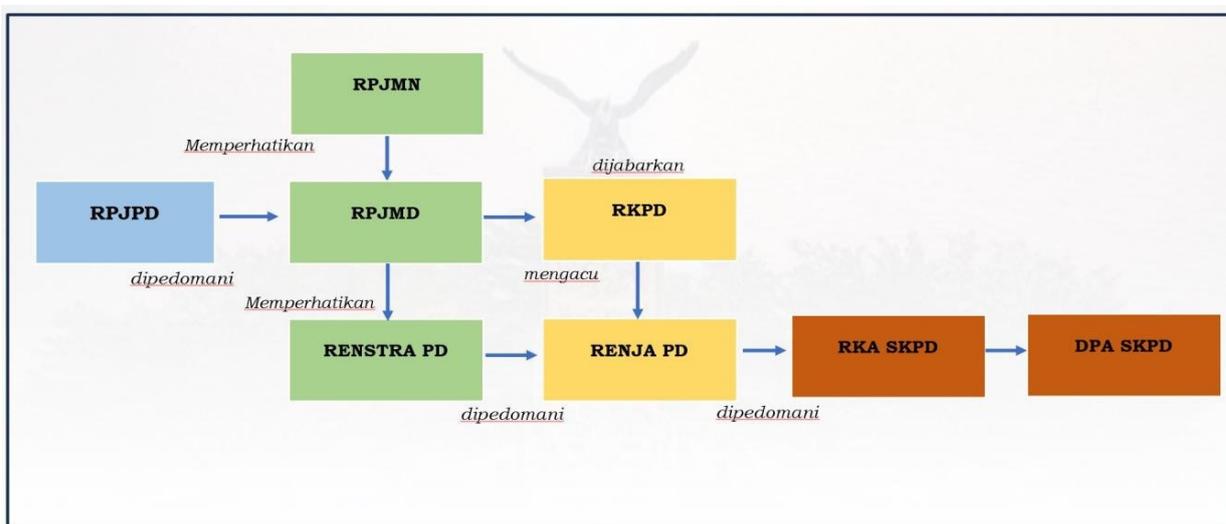
Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan. Pasca pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Kemudian dalam melaksanakan amanat pasal 65 dan pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Kepala Daerah Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mnengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 - 2029 untuk dibahas dan ditetapkan secara Bersama-sama. Selanjutnya sebagai penjabaran operasional pada level Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 272 Undang-Undang Noor 23 Tahun 2014 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa Perangkat Daerah Menyusun rencana strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD dan dilaksanakan stimulant dan terkoordinasi.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana Pembangunan bersifat sektoral yang disusun berpedoman kepada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya Rencana strategis Perangkat Daerah dimanfaatkan untuk menjadi rumusan kedalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Perencanaan strategis merupakan Langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2045, RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029, dan memperhatikan



kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan diharapkan dapat terintegrasi, tersinkronisasi dan disinergikan antara potensi sumber daya, peluang dan tantangan khususnya di bidang perencanaan pembangunan dan di bidang penelitian agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang akuntabel, efisien dan efektifitas.

Gambar I.1
Bagan keterkaitan Dokumen Perencanaan



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 
- 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029
11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud daripada penyusunan Renstra adalah menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja selama periode tertentu. Selain itu Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan merupakan wujud implementasi operasional visi, misi, dan agenda Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam RPJMD tahun 2025 - 2029, dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis serta kebutuhan pelayanan masyarakat. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan , program dan kegiatan Perangkat Daerah beserta kerangka pendanaan untuk periode lima tahun dibidang perencanaan pembangunan, dan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029.

2. Menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan kinerja dan rencana kerja tahunan perangkat daerah (Renja)
3. Menjadi dasar pengendalian, evaluasi, dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah melalui indikator kinerja utama dan sasaran yang terukur, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat dievaluasi secara objektif.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 -2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai Latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Bappeda Litbang 2025 - 2029.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan Gambaran pelayanan Renstra Perangkat Daerah serta permasalahan dan isu Strategis

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, fungsi dan Struktur PD
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

1. Tujuan Perangkat Daerah
2. Sasaran Perangkat Daerah
3. Strategi Perangkat Daerah
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dijelaskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi pemerintah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perda ini mengakibatkan perubahan struktur organisasi di Lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, dan perubahan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nunukan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan, pada tanggal 23 Nopember 2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan merupakan perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan pada unsur Perencanaan, serta unsur Penelitian dan Pengembangan. Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :**
 - (1) Bappeda Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.

- 
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) urusan perencanaan;
 - 2) urusan penelitian dan pengembangan;
 - 3) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 4) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 5) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 6) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - 7) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 8) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 9) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 10) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - 11) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - c. pengendalian organisasi Badan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan badan;
 - e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi;

- 
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya alam;
 - h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - j. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Badan;
 - k. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - l. pengendalian penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan;
 - m. pengoordinasian dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - n. pengoordinasian dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - o. pengoordinasian dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya alam;
 - p. pengoordinasian dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - q. pengoordinasian dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - r. pengoordinasian dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penelitian dan pengembangan daerah;
 - s. pengoordinasian penyiapan rancangan RPJP Daerah dan menjadi bahan utama Musrenbang;

- 
- t. penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang penyusunan RKPD;
 - u. perumusan rencana akhir RPJP Daerah, rancangan RPJM Daerah dan rancangan akhir RKPD;
 - v. penyiapan rancangan Perda tentang RPJP Daerah, RPJM Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD;
 - w. penyiapan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
 - x. penyiapan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah;
 - y. penyiapan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
 - z. pengoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja Perangkat Daerah;
 - aa. perumusan hasil kajian, analisis dan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing - masing Perangkat Daerah sesuai dengan di bidang tugas dan kewenangannya;
 - bb. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD;
 - cc. penyusunan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) berdasarkan wilayah administratif, yaitu penataan ruang wilayah kabupaten dan kecamatan, serta melakukan koordinasi kerja sama penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) antar kabupaten/kota;
 - dd. pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - ee. pelaksanaan penelitian pengembangan rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
 - ff. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;

- gg. pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
- hh. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan di bidang tugasnya; dan
- ii. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Bappeda Litbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan badan;
- b. pengoordinasian kegiatan di lingkup sekretariat;
- c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan;
- d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Badan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Badan;
- h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat membawahi 2 (tiga) Sub Bagian, yaitu:

- 1) **Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan bahan penyusunan,



menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan;
- b. Perencanaan kegiatan di lingkup Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Perencanaan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE)

Bidang PPE mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang PPE menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- b. pengoordinasian perumusan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia (PPM)

Bidang PPE mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang PPM menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian perumusan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

5. Bidang Perekonomian, dan Sumber Daya Alam (PSDA)

Bidang PSDA mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang PSDA menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- 
- b. pengoordinasian perumusan kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - d. penyelenggaraan teknis dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Bidang Infrastruktur, dan Kewilayahan (IK)

Bidang IK mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang IK menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengoordinasian perumusan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (PPID)

Bidang PPID mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang PPID menyelenggarakan fungsi:

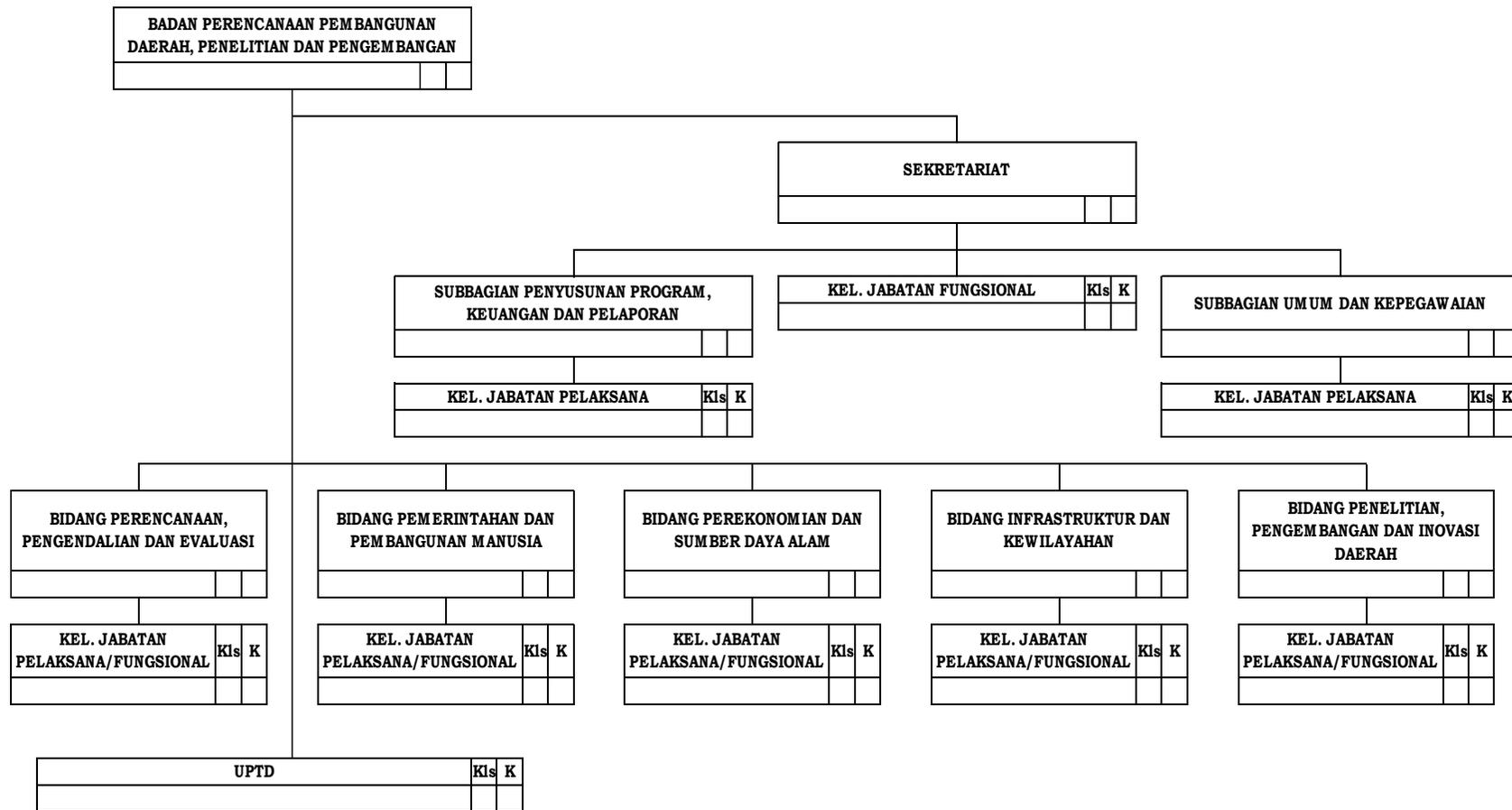
- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang penelitian dan pengembangan daerah
- b. pengoordinasian perumusan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada pada bagan dibawah ini:

Gambar II.1
Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Nunukan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugasnya dan mencapai hasil kinerja pembangunan dalam bidang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan diperlukan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan pada Unsur Perencanaan serta Unsur Penelitian dan Pengembangan adalah seluruh SDM baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), CPNS, P3K maupun Pegawai Honorer (Non ASN). Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi jabatan sebagai berikut:

Tabel II.1.

Tabel Rekapitulasi Jumlah dan Kebutuhan Pegawai

No	Uraian	Kondisi saat ini	Kebutuhan	-/+ (Orang)
1	Pejabat Tinggi Pratama	1 Orang	0 Orang	0
2	Pejabat Administrator	6 Orang	0 Orang	0
3	Pejabat Pengawas	2 Orang	1 Orang	0
4	Pejabat Fungsional			
	Perencana Pertama	3 Orang	10 Orang	7 Orang
	Perencana Muda	6 Orang	12 Orang	6 Orang
	Perencana Madya	0	5 Orang	5 Orang
	Peneliti Pertama	1 Orang	4 Orang	3 Orang
	Peneliti Muda	0	2 Orang	2 Orang
	Peneliti Madya	0	1 Orang	1 Orang
5	Penelaah Teknis Kebijakan	10 Orang	10 Orang	10 Orang
6	Pengolah Data	2 Orang	8 Orang	6 Orang
7	Pengadministrasian Perkantoran	2 Orang	2 Orang	2 Orang
8	PPPK	4 Orang	9 Orang	5 Orang
	Total	37 Orang	64 Orang	47 Orang

Sumber data: diolah, 2025

Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja organisasi, sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu aspek penting dan krusial yang dibutuhkan. Dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa berdasarkan analisis beban kerja dan rencana strategis jangka menengah, jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh fungsi organisasi secara optimal adalah sebanyak 64 orang.

Namun sampai saat ini jumlah pegawai yang tersedia hanya 37 Orang atau sekitar 57,81 % dari total kebutuhan ideal. saat ini pelaksanaan kegiatan perbidang sektoral dibantu oleh tenaga non pegawai. Peningkatan kompetensi juga sangat diperlukan untuk mendukung berjalannya organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan. Peningkatan kompetensi diperuntukkan bagi ASN termasuk didalamnya CPNS dan PPPK yang ada diantaranya:

- a. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
- b. Diklat Penyusunan Renstra
- c. Diklat Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- d. Diklat penyusunan Rencana Pembangunan Janga Panjang Daerah (RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- e. Diklat Proses Bisnis (Probis)
- f. Diklat Penyusunan Renja
- g. Diklat Penyusunan Kajian Lingkungan Hdiup Strategis (KLHS) RPJMD
- h. Diklat Manajemen Risiko
- i. Diklat Jabatan Fungsional Perencana

Dengan upaya tersebut, diharapkan kualitas pelayanan dan kinerja kelembagaan tetap terjaga dan dapat meningkat seiring perkembangan reformasi birokrasi digital yang menjadi grand desain reformasi birokrasi, meskipun dalam keterbatasan jumlah pegawai yang ada saat ini. Komitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia birokrasi harus menjadi prioritas dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, responsive dan professional. Adapun jumlah pegawai Bappedalitbang Kabupaten Nunukan berdasarkan kualifikasi jenis kelamin yang dimiliki dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar II.2
Grafik ASN BappedaLitbang Kabupaten Nunukan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



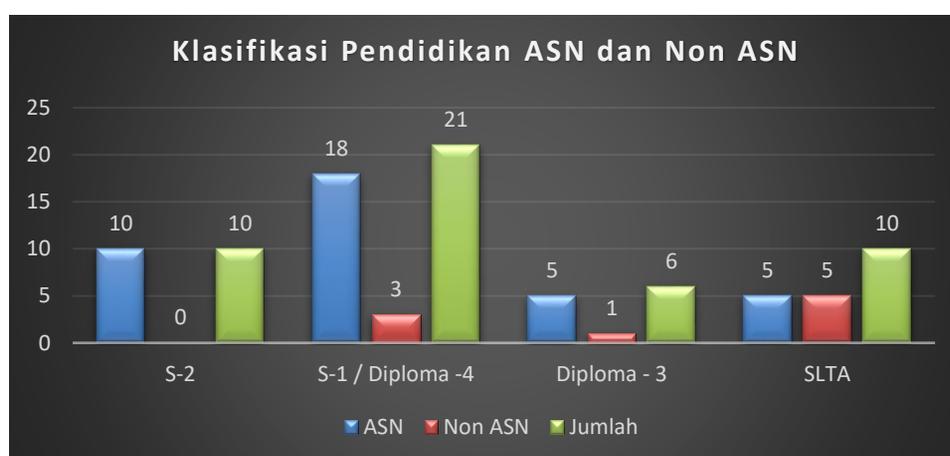
Sumber : *data diolah, 2025*

Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Nunukan terdiri dari ASN dan Pegawai Non ASN. Dari gambar 2.2 berdasarkan pada jenis kelamin ASN pria berjumlah 19 Orang dan ASN Wanita berjumlah 18 orang yang ditempatkan pada seluruh bidang dan sekretariat. Selain ASN terdapat pula pegawai Non ASN dengan jenis kelamin laki-laki 6 orang dan Perempuan 4 orang yang ditempatkan diseluruh bidang dan sekretariat untuk membantu tugas dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat.

a) Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang ada di BappedaLitbang Kabupaten Nunukan dengan jumlah 47 orang yang terdiri dari ASn dan Non ASN dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SLTA samai dengan Pascasarjana seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.

Gambar II.3
Grafik ASN BappedaLitbang Kabupaten Nunukan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

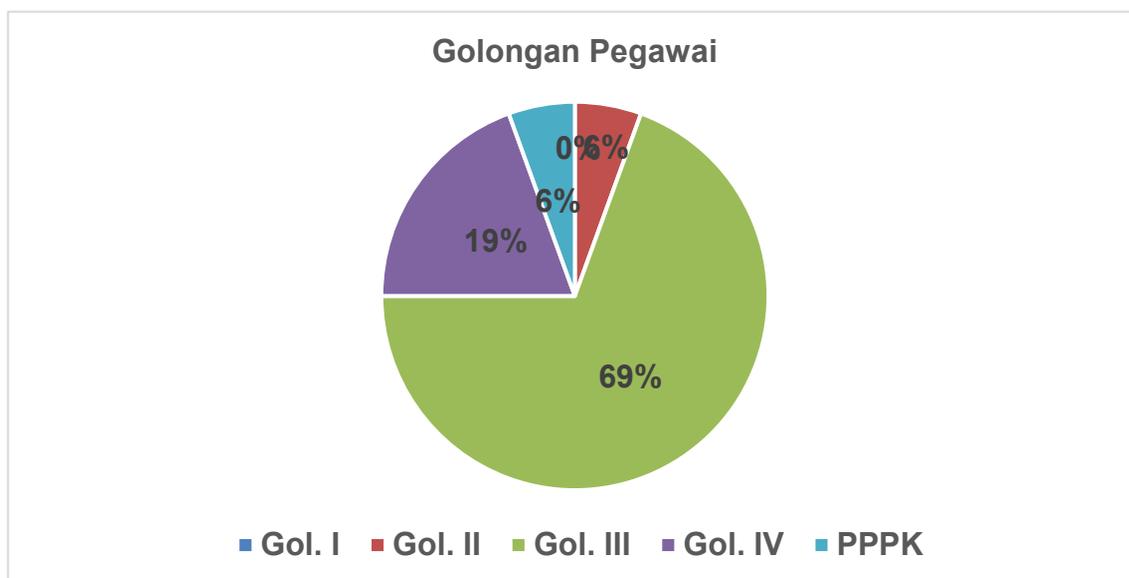


Sumber : *data diolah, 2025*

b) Pegawai berdasarkan golongan

PNS Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, jika dilihat berdasarkan penggolongan dan pengelompokan memiliki Pegawai Negeri Sipil Golongan IV berjumlah 7 Orang (19%), Golongan III berjumlah 25 Orang (67%), Golongan II berjumlah 0 Orang (0,02%), Golongan I tidak ada, dan PPPK berjumlah 4 Orang (10 %).

Gambar II.4
Grafik PNS BappedaLitbang Kabupaten Nunukan Berdasarkan Golongan
Tahun 2025



Sumber: data diolah, 2025

Tabel II.2
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (ASN-PNS) Berdasarkan
Pangkat dan Golongan
Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan
Per September 2025

No.	PANGKAT/GOLONGAN	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina	IV/a	6
3	Penata Tingkat I	III/d	6
4	Penata	III/c	3
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
6	Penata Muda	III/a	12
7	Pengatur Tingkat I	II/d	1
8	PPPK		4
Jumlah			37

Sumber Data: Diolah, 2025

Untuk melaksanakan tugasnya dan mencapai hasil kinerja pembangunan dalam hal perencanaan serta penelitian dan pengembangan diperlukan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai.

2) Sarana dan Prasarana

Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan memiliki prasarana berupa Gedung Kantor berlantai 2 yang berlokasi di Kompleks Kantor Bupati Nunukan, Jalan Sei Jepun Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77482.

Hingga September Tahun 2025 alokasi pemanfaatan prasarana Gedung Kantor pada Lantai 1 terdiri atas Front Office, Ruang Kepala Badan, Ruang Sekretariat, Ruang Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, Ruang Tamu, Resepsionis, Pantri dan Area Merokok (*Smoking Area*).

Sementara di Lantai 2 terdapat Ruang Rapat (*Meeting Room*), Ruang Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ruang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (PPID).

Selanjutnya sarana utama pendukung operasional kantor dan pekerjaan aparatur sehari-hari terdiri atas kendaraan dinas roda empat dan roda dua, mebelair, Komputer (Desktop PC), Laptop/Notebook, Printer, Scanner, Infocus & LCD, Kamera, perangkat telekomunikasi dan informasi, dan mesin pendingin (AC dan Kipas Angin). Selain sarana utama, terdapat pula sarana pendukung seperti peralatan dapur, peralatan kebersihan dan pertamanan serta sarana pendukung lainnya.

Rekapitulasi jenis, jumlah dan kondisi sarana pendukung operasional kantor dan pekerjaan aparatur di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan hingga September tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.3
Rekapitulasi Sumber Daya Sarana Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi
1.	Gedung Kantor 2 Lantai	2	Baik
2.	Halaman Kantor	2	Baik
3.	Garasi	1	Baik
4.	Kendaraan Roda 4	5	Baik
5.	Kendaraan Roda 2	7	Baik
6.	Laptop	28	Baik
7.	Lemari Besi Brother	3	Baik
8.	Lemari Kayu	1	Baik
9.	Filing Kabinet Besi	1	Baik
10.	Brankas	1	Baik
11.	Lemari Kaca	7	Baik
12.	Papan Pengumuman	4	Baik
13.	Alat Kantor Lainnya	10	Baik
14.	Meja Rapat	8	Baik
15.	Meja Resepsionis	1	Baik
16.	Kursi Rapat	56	Baik
17.	Lemari Es	1	Baik
18.	AC	17	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi
19.	Televisi	3	Baik
20.	Sound System	1	Baik
21.	Dispenser	4	Baik
22.	Karpet	1	Baik
23.	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik
24.	Meja Pejabat Esselon	17	Baik
25.	Kursi Pejabat Esselon	51	Baik
26.	Lemari Buku Arsip	9	Baik
27.	Camera View Finder	1	Baik
28.	Handphone Encription	1	Baik
29.	PC	7	Baik
30.	Camera Digital	1	Baik
31.	Baterai Handycam	2	Baik
32.	PC Unit	11	Baik
33.	Laptop	22	Baik
34.	Printer	20	Baik
35.	Scanner	3	Baik
36.	External/Portable Hardisk	2	Baik

Sumber : *Sekretariat BappedaLitbang, 2025*

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas fungsi Bappeda Litbang yang diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan, maka Bappeda Litbang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam penetapan kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Bappeda kitbang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel II.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Rasio Capaian pada Tahun						
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Persentase Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi perencanaan, dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	14,00	19,01	25,49	32,00	38,00							
5	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada	Dokumen	2	2	3	3	3	2	2	3	100	100	100	100
6	Jumlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	RPD	2	2	3	3	3	2	2	3	100	100	100	100
6	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	8	8	9	9	9	8	8	9	100	100	100	100
7	Persentase Keselarasan dokumen Renstra terhadap RPJMD dan dokumen Renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Keselarasan dokumen Renstra terhadap RPJMD dan dokumen Renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Rasio Capaian pada Tahun						
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
11	Persentase Keselarasan dokumen Renstra terhadap RPJMD dan dokumen Renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	13	13	14	13	14	14	13	14	108	100	100	100
13	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Laporan	13	13	13	13	13	13	13	13	100	100	100	100
14	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
15	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
16	Jumlah penambahan Barang Milik Daerah (BMD) Kelompok Aset Tetap	Unit	12	12	10	12	12	12	12	12	100	100	100	100
17	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
18	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala Barang Milik daerah (BMD) Kelompok Aset Tetap	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
19	Jumlah hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Laporan	2	1	1	1	1	2	1	1	100	100	100	100
20	Jumlah Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
21	Jumlah Inovasi yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	5	5	5	3	3	5	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
18	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%			
19	Rata-rata capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%			
20	Rata-rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%			
21	Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang pembangunan dan perencanaan daerah	%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%			
22	Rata-rata capaian pelaksanaan pengendalian, evaluasi laporan Perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%			
23	Rata-rata capaian pelaksanaan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%			
24	Rata-rata capaian pelaksanaan Koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%			
25	Rata-rata capaian pelaksanaan Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%			
26	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan	%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%			
27	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%			
28	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan rekomendasinya	%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%			
29	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	%	80%	85%	-	-	-	80%	85%	-	-	-	100%	100%			
30	Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%			100%	100%	
31	Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%			100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
32	Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
33	Persentase cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
34	Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
35	Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
36	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun	Dok	-	-	4 Dok	3 Dok	2 Dok	-	-	4 Dok	3 Dok	2 Dok	-	-	100%	100%	
37	Tersedianya Buku Profil Pembangunan daerah	Buku	-	-	3 Buku	3 Buku	3 Buku	-	-	3 Buku	3 Buku	3 Buku	-	-	100%	100%	
38	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	-	100%	100%	
39	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Terkoordinasi penyusunan Dokumen perencanaannya	PD	-	-	23 PD	23 PD	23 PD	-	-	23 PD	23 PD	23 PD	-	-	100%	100%	
40	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	PD	-	-	9 PD	9 PD	9 PD	-	-	9 PD	9 PD	9 PD	-	-	100%	100%	
41	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi Penyusunan dokumen perencanaan	PD	-	-	4 PD	4 PD	4 PD	-	-	4 PD	4 PD	4 PD	-	-	100%	100%	
42	Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	100%	100%	
43	Jumlah Laporan hasil penelitian Dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	100%	100%	
44	Jumlah Laporan hasil penelitian Dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	100%	100%	
45	Jumlah Laporan hasil Pengembangan inovasi dan teknologi	Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	100%	100%	

Sumber: data diolah, 2025

Tabel II.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025**	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persentase Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada	1.778.329.800	3.799.317.671	3.774.735.256		4.225.941.256	2.997.203.096	3.133.645.436		81,80	78,89	83,02			
2	Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD	1.229.841.925,	2.232.338.805	3.008.780.205		1.006.003.529	1.661.198.830	2.214.876.967		66,04	74,42	73,61			
3	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi perencanaan, dan keuangan Perangkat Daerah	4.760.152.408	5.724.945.499	7.560.856.475		1.174.410.867	5.275.069.946	6.908.861.824		88,78	92,14	83,76			
4	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	488.033.400	769.348.435	574.856.760		385.750.848	678.605.135	239.626.364		79,04	88,21	41,68			

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2.5 dan tabel 2.6 data target dan realisasi kinerja pelayanan perangkat daerah periode 2021-2026, menyajikan informasi sebagai berikut,

- 1) Sasaran kinerja Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
 - a. Sasaran kinerja meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada dan Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD
 - b. Berdasarkan rata-rata realisasi kinerja dari tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja telah memenuhi kriteria tinggi dalam penilaian kinerja, dimana pada tahun 2022 rata-rata realisasi kinerja sebesar 85,74% dibanding rata-rata target sebesar 97,5%, kemudian pada tahun 2023 rata-rata kinerja meningkat sebesar 89,33% dibanding rata-rata target sebesar 97,5% dan tahun 2024 terdapat penyesuaian target menjadi 90% dengan rata-rata kinerja sebesar 92,91%, secara umum menunjukkan kinerja yang terus meningkat dalam mencapai sasaran dan tujuannya, melalui peningkatan kinerja yang konsisten dari tahun ke tahun.

Dalam rangka pelaksanaan kinerja tersebut dari tahun 2022-2024 didukung dengan penganggaran yang bervariasi nominalnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kinerja dan anggaran pada sasaran meningkatkan kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah terserap anggaran dengan rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2022 sebesar 94,59 %, hal tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran digunakan. Ini mengindikasikan pelaksanaan program yang agresif dan sesuai rencana, kemudian pada tahun 2023 rata-rata rasio sebesar 74,25%, terjadi penurunan dari tahun 2022, hal tersebut sebagai upaya efisiensi, di mana PD mampu meningkatkan kinerja (dari 85,74% menjadi 89,33%) dengan anggaran yang

jauh lebih hemat dan pada tahun 2024 rata-rata rasio sebesar 87,70%, bahwa PD berhasil mencapai kinerja tertinggi dengan memanfaatkan anggaran yang lebih optimal.

2) Sasaran kinerja Meningkatkan fungsi penyelenggaraan kelitbangan:

- a. Sasaran kinerja yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan dan Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah;
- b. Hasil realisasi kinerja dari tahun dibandingkan dengan target menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 kinerja belum tercapai, kemudian pada tahun 2024 realisasi kinerja menunjukkan kinerja tercapai dibandingkan target yang ditetapkan;
- c. Berdasarkan rata-rata realisasi kinerja dari tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja masih pada kriteria sedang-tinggi dalam penilaian kinerja, dimana terlihat ada tren peningkatan yang konsisten dan signifikan dimana pada tahun 2022 ke tahun 2023: terjadi peningkatan kinerja yang substansial sebesar 21,74% (dari 61,11% menjadi 82,85%). Ini menunjukkan adanya perbaikan besar dalam mencapai target dan sasaran, kemudian dari tahun 2023 ke 2024, Kinerja terus meningkat, meskipun dengan laju yang lebih kecil, yaitu 5,12% (dari 82,85% menjadi 87,97%), secara umum data kinerja menunjukkan bahwa Bapperida memiliki kinerja yang terus membaik dan semakin efektif walaupun belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya komprehensif untuk memperbaiki kinerja pada sasaran ini sehingga fungsi penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan dapat optimal dimanfaatkan dalam pembangunan;

Pada pelaksanaan kinerja dan anggaran pada sasaran Meningkatkan fungsi penyelenggaraan kelitbangan terserap anggaran dengan rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2022 sebesar 90,17%, kemudian pada tahun 2023 sebesar 86,81% dan tahun 2024 sebesar 73,86%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan dari tahun 2022 sampai tahun 2024, hal tersebut

menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belum maksimal untuk mendukung kinerja, serta diakibatkan proses penganggaran yang tidak sinkron dengan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan batal atau tertunda.

3) Faktor Pendukung

- a. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah sangat tinggi;
- b. dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- c. pemilihan program, kegiatan, subkegiatan dan dukungan pendanaan;
- d. optimalisasi instrument pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- e. pemanfaatan data dan informasi;
- f. komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf;
- g. kolaborasi antar bidang koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;

4) Faktor Penghambat

- a. Belum terpenuhinya jumlah ASN yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja;
- b. belum memadainya kapasitas dan kompetensi SDM;
- c. Komitmen Perangkat Daerah masih rendah terhadap pemanfaatan data dan informasi hasil pengendalian dan evaluasi
- d. Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai dan mudah diakses
- e. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan berdampak
- f. Rendahnya kesadaran pemahan Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan inovasi daerah

d. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran pelayanan merupakan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program ,kegiatan, dan layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah . Kelompok sasaran pelayanan mencerminkan upaya strategis untuk menjamin bahwa setiap proses program kegiatan benar-benar menyentuh kebutuhan penerima layanan dan kepentingan daerah. Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan memiliki kelompok sasaran adalah seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan masyarakat. Sebagai instansi yang memiliki fungsi koordinasi Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan menyasar kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dilakukan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi serta sinkronisasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan seluruh Kecamatan. Pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat teknoratis, namun juga menukung pengambilan keputusan berbasis data dan aspirasi masyarakat. Adapun kelompok sasaran layanan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7
Kelompok sasaran layanan Bappeda Litbang

NO.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok sasaran
1.	Sekretariat	Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan administrasi umum Pengelolaan barang milik daerah Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan administrasi kepegawaian Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan Penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Pimpinan dan Pegawai Bappeda Litbang Perangkat Daerah Masyarakat Instansi vertikal dan lembaga terkait
2.	Bidang PSDA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan ➢ Asistensi penyusunan dokumen perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ PD Koordinasdi Bidang PSDA <ul style="list-style-type: none"> • DKPP • DKUKMPP • Disbudporapar

NO.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah ➤ Koordinasi pealaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah ➤ Fasilitasi pertemuan lainnya berkaitan dengam urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam 	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPSTP • Dinas Perikanan • DLH • Distranaker • Bapenda • BPKAD • Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA) • Instansi Vertikal terkait urusan yg masuk dalam koordinasi bidang PSDA • Asosisasi dan lembaga lainnya yg berkaitan dengan PSDA
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan RAD HAM, SDGS, Kemiskinan dan Germas dan Forum Kabupaten Kota Sehat. ➤ Koordinasi dan sinkronisasi bidang PPM ➤ Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi laporan (SDGS, Kemiskinan, Germas, Stunting) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PD Koordinasi Bidang PPM • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan P2KB • DSPPPA • Satpol PP • Dinas PMD • Bakesbangpol • BKPSDM • Disdukcapil • Inspektorat Daerah • Sekretariat DPRD • Dinas Perpustakaan • Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan...) • Seluruh Kecamatan yang ada di Kab.Nunukan

NO.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok sasaran
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perangkat Daerah Pengampu SDGs ➤ PD Pengampu Kemiskinan, Stunting
4	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan ➤ Asistensi penyusunan dokumen perencanaan ➤ Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah ➤ Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah ➤ Fasilitasi pertemuan lainnya berkaitan dengan urusan Infrastruktur dan Kewilayahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PD Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan <ul style="list-style-type: none"> • DPUPR • Dinas Perkim • Dishub • Disdamkar • Diskominfotik • BPPD • BPBD ➤ Sekretariat Daerah (Bagian) ➤ Instansi vertikal dan lembaga terkait ➤ Masyarakat
5	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PD Koordinasi bidang penelitian, pengkajian dan inovasi daerah ➤ Instansi vertikal dan lembaga terkait ➤ Universitas ➤ Masyarakat

Sumber : *data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kelompok sasaran layanan yang menjadi fokus penyelenggaraan pelayanan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan dengan fokus masing-masing bidang yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Kelompok sasaran pelayanan dilakukan sebagai bahan dari upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan , program, kegiatan dan layanan yang disusun oleh Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan tepat sasaran, efektif dan memberikan dampak yang optimal dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan berkontribusi pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

e. Mitra Perangkat Daerah dan Pembangunan dalam pemberian pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan menjalin kemitraan dengan para pihak untuk bekerjasama dan berkolaborasi untuk membantu menyampaikan atau memfasilitasi pelaksanaan layanan dan program kepada kelompok sasaran, sehingga kebijakan, program, kegiatan dan layanan yang disusu oleh Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan dapat tepat sasaran, efektif dan memberikan dampak yang optimal.

Kemitraan ini mencakup unsur Pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat dan media yang masing- masing memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan kelitbangan dan inovasi daerah.

Berikut adalah rincian mitra Perangkat Daerah dalam mendukung kinerja pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan yang tersaji pada tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.8
Mitra Perangkat daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1.	BPKAD	1. sinkronisasi Pendanaan PD dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 2. Pengembangan model pembiayaan Strategis dan Inovatif 3. Tersedianya data proyeksi pembiayaan daerah	. Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD . Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
2.	Sekretariat DPRD,	keselarasan aspirasi anggota DPRD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
3.	Bappeda	Tersedianya data proyeksi pendapatan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
4.	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Terlaksananya harmonisasi dan fasilitasi penetapan produk hukum daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
5.	DLH, Dinas PUPR, Perkim dan BPBD	Penyelarasan dengan dokumen spasial, tematik dan strategis lainnya	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
6.	Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi dengan analisis resiko PD 2. Terlaksananya reviu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sinkronisasi dan penyalarsan perencanaan PD dan antar PD 2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
7	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah 2. Pengembangan kerangka dan strategi investasi dan kerjasama pembangunan 	Meningkatnya efektifitas Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
8.	Diskominfo dan BPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan data hasil pembangunan 2. Publikasi aksesibilitas terhadap data pembangunan 	Terwujudnya tata kelola data pembangunan daerah yang berkualitas, terpadu
9	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)	Tersedianya data realisasi fisik dan keuangan pembangunan daerah	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
10.	BKPSDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN untuk mendukung tugas pokok dan fungsi 2. Terpenuhinya kuantitas, kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan SDM Perencana 	1. Meningkatnya pelayanan kepegawaian dan administrasi Umum PD

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
11.	PTN Negeri dan Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pembinaan dan pengembangan inovasi daerah 2. Kerjasama antara Pemerintah, Perguruan Tinggi dan sektor swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas riset daerah 2. Meningkatnya tata kelola inovasi di daerah

Sumber : data diolah, 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel diatas memiliki peran penting, dalam mendukung penyelenggaraan layanan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan. Kolaborasi yang terjalin antara Perangkat Daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan. Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan adalah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Rumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan	Masalah Pokok	Masalah	Faktor yang mempengaruhi
Penyusunan Dokumen perencanaan berkualitas yang belum optimal	Perencanaan pembangunan daerah belum optimal dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil	Perencanaan Pembangunan daerah belum terintegrasi, sinkron dan sinergi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya partisipasi publik dalam penyusunan dokren 2. Terbatasnya anggaran dalam upaya merealisasikan rencana 3. Sulitnya memprioritaskan kegiatan dikarenakan konflik kepentingan
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang belum berjalan optimal	Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang belum optimal dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil perencanaan berikutnya	Perencanaan pembangunan daerah pengendalian dan evaluasi belum terintegrasi, sinkron dan sinergitas dengan optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Belum optimalnya akses Perangkat Daerah dalam pemanfaatan e-monev 5. Belum optimalnya Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan PD 6. Belum optimalnya updating data PD pada e-walidata SIPD 7. Belum terintegrasinya sistem pelaksanaan Dalev
Pemanfaatan inovasi daerah Kabupaten Nunukan belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan hasil inovasi daerah	Kegiatan pembinaan dan pengembangan inovasi di daerah masih terbatas, ditunjukkan oleh minimnya program pelatihan, inkubasi, serta dukungan teknis yang berkelanjutan bagi pelaku inovasi lokal.	Elaborasi penginputan data inovasi pada aplikasi kementerian/lembaga belum optimal

Tabel 2.10
Penentuan Isu Strategis BappedaLitbang Kabupaten Nunukan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	
<p>Berdasarkan UU. Nomor 25 tahun 2004 UU. No. 23 tahun 2014 UU. No. 11 tahun 2019 Perpres 78 Tahun 2021 Permendagri No. 86 Tahun 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki kedudukan strategis sebagai koordinator perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan seluruh perangkat daerah yang menjadi unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah; Memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan dibidang riset dan inovasi daerah Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen perencanaan berkualitas yang belum optimal Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang belum berjalan optimal Pemanfaatan inovasi daerah Kabupaten Nunukan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor-sektor ekonomi basis/ unggulan Rentannya ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Intelegence Artificial (IA) dan digitalisasi Perkembangan Teknologi Ancaman perubahan iklim dan menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Prioritas Nasional 7 RPJMN : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Tata kelola dan akuntabilitas Pemerintah 	<p>Belum optimalnya tata kelola pemerintahan</p> <p>Penyusunan dokren harus memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang baik dengan Pendanaan pembangunan yang memadai</p> <p>Perencanaan pembangunan belum didukung sepenuhnya oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berdasarkan satu data</p> <p>Masih kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait untuk</p>	

						<p>menumbuh kembangkan iklim inovasi daerah.</p> <p>Rendahnya tingkat pemanfaatan hasil inovasi daerah</p>
--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

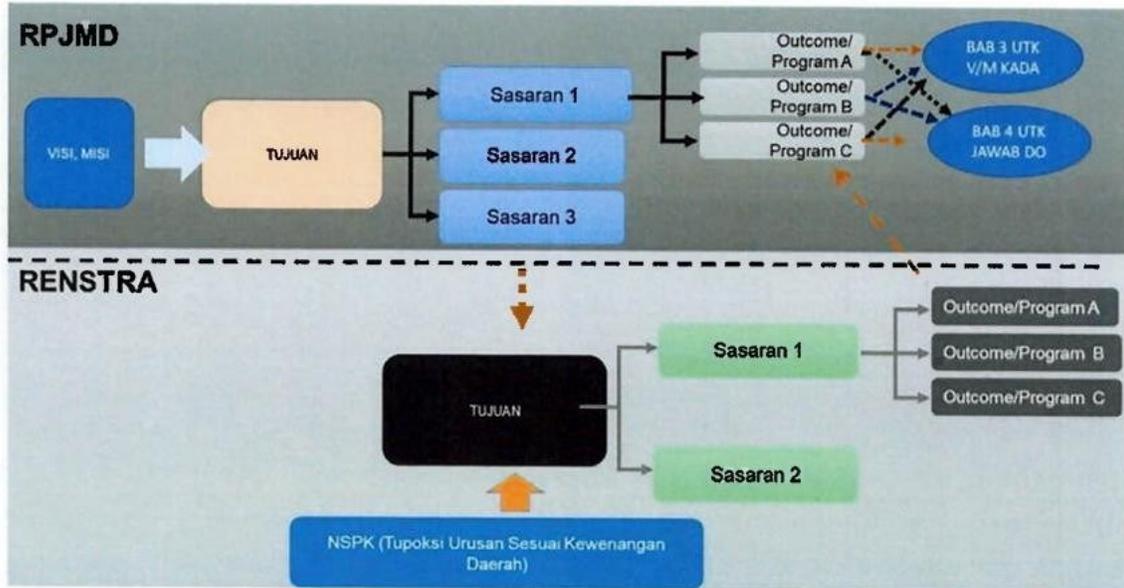
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah. Kemudian sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mendeskripsikan bahwa Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, standar, prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD. Untuk sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah dilaksanakan sesuai mandat perangkat daerah, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan, sasaran, atau *outcome* pada level Pemerintah Daerah. Selain itu Tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah dapat bersifat *cascading* (*direct cascading* dan/ atau *cause effect cascading*). Adapun gambaran hubungan tujuan, sasaran, *outcome* RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra PD tersaji pada gambar berikut.

Gambar 3.1

Hubungan tujuan, sasaran, outcome RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra PD



Sumber: Inmendagri No 2 Tahun 2025

Visi merupakan kondisi yang akan dicapai, sedangkan agenda pembangunan untuk mencapai visi dirumuskan dalam bentuk misi, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan. Selanjutnya Misi merupakan rumusan umum tentang upaya mencapai visi. Misi RPJMD juga transformasi dari misi Bupati dan Wakil Bupati yang secara substansi selaras dengan misi pembangunan jangka panjang daerah. Visi sebagai rumusan umum yang akan dicapai memerlukan berbagai prakondisi untuk mencapainya. Kondisi sebagai prasyarat untuk mencapai visi dirumuskan dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun, sedangkan sasaran merupakan rangkaian kinerja dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang diturunkan dari tujuan. Adapun rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagaimana pada tabel berikut,

Tabel 3.1
VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2025- 2029

Visi	KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI				
Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator	
Misi 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan merata	Terwujudnya sumber daya yang berkualitas dan merata				Indeks Pembangunan Manusia
		1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1.	Rata-rata lama sekolah
		2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata	2.	Harapan lama sekolah
Misi 2 Peningkatan dan percepatan ;pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang akseleratif	1.	Meningkatnya pertumbuhan dan nilai tambah sektor pertanian, dan industri pengolahan	1.	Pesentase kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
		2.	Meningkatnya daya saing UMKM	2.	Pesentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan
		3.	Meningkatnya daya tarik investasi daerah		Pesentase UMKM naik level
	Meningkatnya pemerataan keajahteraan			1.	Realisasi investasi
				1.	Tingkat Kemiskinan
				2.	Gini Ratio
		1.	Menguatnya perlindungan sosial	•	Indeks kesejahteraan sosial
		2.	Meningkatnya Keberdayaan perempuan	•	Indeks ketimpangan gender
		3.	Meningkatnya kesempatan kerja	•	Tingkat Pengangguran terbuka
		Misi 3 Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani,	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang profesional	1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2.	Terwujudnya layanan publik yang prima			Indeks Pelayanan Publik	

secepat dan tuntas		3.	Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Indeks SPBE	
		4.	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan perencanaan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	
		5.	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Nilai Sistem Merit	
Misi 4 : Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata	Terwujudnya infrastruktur kewilayahan yang adil, tangguh dan berwawasan lingkungan			1.	Indeks kepuasan layanan infrastruktur
				2.	Indeks kualitas lingkungan hidup
		1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1.	Indeks Konektivitas
				2.	Indeks Infrastuktur
		2.	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	
		3.	Meningkatnya kualitas penataan lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Air
				2.	Indeks Kualitas Udara
				3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Misi 5 Menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal :	Terciptanya masyarakat harmonis yang rukun, toleran dan berbudaya	1.	Lestarnya kearifan lokal untuk membangun kerukunan dan toleransi	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	
		2.	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas kewilayahan	1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama
				2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan

Dalam rangka mendukung Visi, Misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029, Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) berkontribusi pada Misi ke 3 RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 yakni Penguatan Tata Pemerintahan yang transparan melayani, cepat dan tuntas, dengan hubungan tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tabel Hubungan tujuan dan sasaran RPJMD dengan Renstra PD

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 3 Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat dan tuntas	Terwujudnya transformasi tata kelola yang transparan, melayani, cepat dan tuntas	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP

Sumber : RPJMD Kab. Nunukan Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan tugas dan fungsi berdasarkan Norma, standar, prosedur dan Kriteria (NSPK) dan berkontribusi Bappeda Litbang pada Visi, Misi, tujuan, sasaran, atau outcome pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dirumuskan tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan dengan rumusan sebagai berikut,

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						Keterangan	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah NSDK - UU. No. 25 tahun 2004 - UU. No. 23 tahun 2014 - UU. No. 11 tahun 2019 - Perpres 78 Tahun 2021 - Permendagri No. 86 Tahun 2017 - Permendagri No. 5 Tahun 2017 - Permendagri			Nilai SAKIP Kabupaten	64,56	65,00	65,50	70,00	73,8	75,00	80,00		
			Indek Inovasi Daerah	29.28	30.47	33.26	34.73	35.01	35.78	36.02		
			Indeks Perencanaan Pembangunan	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0	92,0	95,0		
		Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Sasaran 3 : Meningkatnya Pemanfaatan inovasi daerah dalam mendukung		Nilai SAKIP PD	73,95	75,00	78,00	80,00	80,25	82,25	85,00	
				Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	6%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	

Sumber : data diolah, 2025

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Dalam Pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangkat daerah diperlukan strategi. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Penyusunan Strategi Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan didasarkan pada Rumusan Strategi RPJMD 2025-2029 dan Isu Permasalahan serta Kebutuhan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Strategi RPJMD Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan daya saing manusia dan stabilitas wilayah sebagai dasar pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan	Pemerataan infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur ekonomi untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Penguatan sektor strategis untuk maendorong percepatan pembangunan berbasis afirmasi kewilayahan	Pertumbuhan dan penyebarluasan inovasi untuk memantapkan pembanguann sosial, kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan	Perwujudan visi Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil dan mandiri

Sumber: RPJMD Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

Untuk mendukung Strategi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029 dan pelaksanaan pelayanan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah dijabarkan strategi sebagai berikut;

Tabel 3.5
Penahapan Strategi PD Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah yang mendukung isu Percepatan pertumbuhan Ekonomi inklusif berbasis Optimalisasi potensi daerah	Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah yang mendukung isu Pembangunan wilayah yang merata, SDM berkarakter dan ekonomi bernilai tambah	Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah yang mendukung isu Pembangunan SDM unggul dan sentra ekonomi hijau	Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah yang mendukung pembangunan yang mendukung isu Kemajuan pembangunan segala bidang	Mewujudkan kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi hasil berbasis riset dan inovasi dalam Perwujudan fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 3.6
Arah Kebijakan Bappeda Litbang Kab. Nunukan Tahun 2025-2029

OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 25 tahun 2004 2. UU. No. 23 tahun 2014 3. UU. No. 11 tahun 2019 4. Perpres 78 Tahun 2021 5. Permendagri No. 86 Tahun 2017 6. Permendagri No. 5 Tahun 2017 Permendagri No. 7 Tahun 2023 7. Perda Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 8. Pergub Provinsi Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dasar optimalisasi regulasi, termasuk praregulasi yang memadai 2. Membangun dasar pengawasan proses pengembangan karier, promosi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi 3. Membangun dasar peningkatan respon terhadap laporan pelayanan publik masyarakat 4. Membangun dasar percepatan digitalisasi membangun dasar layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek Pemerintahan digital 5. Membangun dasar peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi , transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta tranparansi layanan perizinan berbasis digital 6. Membangun dasar pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan kesuaian isu pembangunan dengan kebutuhan masyarakat melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang; 2. meningkatkan keselarasan isu pembangunan dengan dokumen perencanaan spasial, tematik dan kajian lingkungan dan dokumen strategis lainnya; 3. Optimalisasi pemanfaatan satu data dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4. mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang efektif, akuntabel dan tepat waktu serta berbasis teknologi informasi; 5. Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional; 6. Meningkatkan keselarasan kinerja dan dukungan program, kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah melalui verifikasi dan pengendalian dokumen perencanaan PD; 7. Optimalisasi keselarasan kinerja antar perangkat daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan melalui Forum

	<p>keseluruh pelosok.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK diberbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi disektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perariran dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayanan c. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melauai pelatihan talenta digital dasar, menengah dan tinggi, serta kepemimpinan digital <p>7. Membangun dasar pengembangan smart goverment serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasits digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah</p> <p>8. Membangun dasar penguatan integritas partai politik</p> <p>9. Membangun dasar perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen resiko.</p>	<p>lintas PD dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pembangunan;</p>
--	---	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

Dalam rangka perwujudan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian tertuang dalam program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sedangkan subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan, serta indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan.

Perumusan dan penetapan Program, kegiatan, dan subkegiatan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome* dan output, serta mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk memastikan langkah operasional yang tepat dalam rangka mencapai tujuan strategis perangkat daerah dan berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun rumusan Program yang akan diselenggarakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 selama lima tahun adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui pelaksanaan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan upaya kegiatan yaitu melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), selanjutnya pelaksanaan kegiatan analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memastikan perencanaan pembangunan disusun berbasis data yang berkualitas, terpadu, dan mendukung perencanaan berbasis satu data serta pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi perencanaan Pembangunan daerah baik itu RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Nunukan. Dalam pelaksanaan program ini harus dukungan oleh seluruh komponen masyarakat, aparatur pemerintah, hingga pihak yang melaksanakan pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah berkontribusi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui sinkronisasi dan sinergitas perencanaan perangkat daerah dengan Perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat terselaraskan, antar perangkat daerah, tepat sasaran dan terciptanya kolaborasi dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Melalui pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada bidang rencana, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat evaluasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah pada bidang rencana dan melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pada bidang koordinasi perencanaan. Kemudian untuk peningkatan mutu dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Program ini

disusun untuk mendukung perencanaan berbasis pendekatan tematik, holistik dan spasial sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah selama lima tahun ke depan sehingga dapat efektif, efisien, tepat sasaran, tepat wilayah dan tepat dalam menyelesaikan masalah. setiap tahapannya memerlukan pengendalian dan evaluasi baik di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur dan kewilayahan.

3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah berkontribusi pada peningkatan kualitas riset di daerah yang mana difokuskan untuk memperkuat kebijakan pemerintah daerah yang berbasis pada kelitbangan terapan dan tematik, dengan menempatkan hasil penelitian sebagai rujukan utama dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan daerah. Penelitian dijalankan secara sistematis untuk memberikan masukan pada tahap awal penyusunan kebijakan, menjadi katalisator pencapaian sasaran pembangunan, serta alat evaluatif terhadap kinerja perangkat daerah.

Berbeda dengan *Program Riset dan Inovasi Daerah* yang berorientasi pada penciptaan solusi dan pengembangan teknologi atau model inovatif, *Program Penelitian dan Pengembangan* berperan menyediakan dasar analitis dan bukti empiris bagi perumusan kebijakan yang relevan, adaptif, dan terukur. Program ini menjalankan fungsi kelitbangan sebagai elemen strategis dalam pencapaian visi-misi pembangunan daerah secara menyeluruh, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program didukung oleh data dan kajian yang valid sesuai arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diamanatkan dalam RIPJPID 2025-2029

4. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH

Program Riset dan Inovasi Daerah berkontribusi pada peningkatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam pembangunan daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan berbasis riset dan inovasi. Program ini menjadi bagian strategis dari upaya menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang kondusif di daerah. Melalui program ini, Bappedalitabang Kabupaten

Nunukan berperan penting dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan riset yang terarah pada penyelesaian permasalahan utama daerah serta mendorong pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan lintas sektor. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas SDM riset dan inovasi, penguatan kerja sama dengan lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan pendanaan riset daerah yang berkelanjutan.

Program ini dapat berkontribusi nyata terhadap daya saing daerah, inovasi daerah, serta pemanfaatan teknologi dengan memperhatikan isu strategis dan tema pembangunan daerah di Kalimantan Utara.

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Program penunjang urusan pemerintah berkontribusi dalam upaya meningkatkan tata kelola Pelayanan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. dengan memberikan dukungan manajemen, pelayanan, barang dan jasa bagi organisasi perangkat daerah meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah. Adapun Program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN NUNUKAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01 - PERENCANAAN				14.922.741.104,6 1		14.764.509.746,7 7		14.893.549.958,4		15.014.501.810,0 7		15.233.418.145,6 1
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.025.027.938,9 6		11.193.244.330,3 9		11.301.053.553,8 2		11.401.295.979,0 5		11.547.098.688,3 9
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah (%)	100	100	11.025.027.938,9 6	100	11.193.244.330,3 9	100	11.301.053.553,8 2	100	11.401.295.979,0 5	100	11.547.098.688,3 9
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.131.366.064,39		1.296.436.403		1.222.786.403		1.234.436.403		1.185.866.064,39

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	1.131.366.064,39	4	1.296.436.403	4	1.222.786.403	4	1.234.436.403	4	1.185.866.064,39
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	1		1		1		1		1	
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000		56.000.000		52.350.000		64.000.000		64.500.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	1	40.000.000	1	56.000.000	1	52.350.000	1	64.000.000	1	64.500.000
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				40.000.000		65.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	40.000.000	4	65.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.051.366.064,39		1.175.436.403		1.100.436.403		1.100.436.403		1.051.366.064,39
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.051.366.064,39	1	1.175.436.403	1	1.100.436.403	1	1.100.436.403	1	1.051.366.064,39
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.609.813.410,96		7.746.642.340,25		7.870.833.957,82		7.949.426.383,05		7.870.833.958,39
Jumlah laporan pertanggungjawaban bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	38	7.609.813.410,96	38	7.746.642.340,25	38	7.870.833.957,82	38	7.949.426.383,05	38	7.870.833.958,39
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.609.813.410,96		7.746.642.340,25		7.870.833.957,82		7.949.426.383,05		7.870.833.958,39

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	38	7.609.813.410,96	38	7.746.642.340,25	38	7.870.833.957,82	38	7.949.426.383,05	38	7.870.833.958,39
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				204.000.000		219.000.000		263.238.700		263.238.700		204.000.000
Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	19	204.000.000	20	219.000.000	20	263.238.700	23	263.238.700	25	204.000.000
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	57		57		57		57			
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	19	54.000.000	20	54.000.000	20	54.000.000	23	54.000.000	25	54.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		165.000.000		209.238.700		209.238.700		150.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	57	150.000.000	57	165.000.000	57	209.238.700	57	209.238.700	57	150.000.000
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				646.447.453,61		872.504.421		856.504.421		856.504.421		856.504.421
jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	2	646.447.453,61	2	872.504.421	3	856.504.421	3	856.504.421	3	856.504.421
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	8		8		10		10		12	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	28	32		36		36		36		36	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	10		10		10		10		10	
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.000.000		70.072.496		65.072.496		65.072.496		65.072.496
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	45.000.000	3	70.072.496	3	65.072.496	3	65.072.496	3	65.072.496
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000		92.000.000		92.000.000		92.000.000		92.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	2	70.000.000	2	92.000.000	3	92.000.000	3	92.000.000	3	92.000.000
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				110.618.108,61		164.721.040		154.721.040		154.721.040		154.721.040

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	8	110.618.108,61	8	164.721.040	10	154.721.040	10	154.721.040	12	154.721.040
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.829.345		65.710.885		64.710.885		64.710.885		64.710.885
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	10	40.829.345	10	65.710.885	10	64.710.885	10	64.710.885	10	64.710.885
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				380.000.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	28	32	380.000.000	36	480.000.000	36	480.000.000	36	480.000.000	36	480.000.000
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
Jumlah penambahan Barang Milik Daerah (BMD) Kelompok Aset Tetap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0		0		0		0		0		0
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0	0
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	150.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	150.000.000
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				580.551.010		604.556.480		604.556.480		604.556.480		604.556.480	536.760.652,61
jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	580.551.010	12	604.556.480	12	604.556.480	12	604.556.480	12	604.556.480	536.760.652,61

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.618.530		224.624.000		224.624.000		224.624.000		224.624.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	200.618.530	12	224.624.000	12	224.624.000	12	224.624.000	12	224.624.000
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				379.932.480		379.932.480		379.932.480		379.932.480		312.136.652,61
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	379.932.480	12	379.932.480	12	379.932.480	12	379.932.480	12	312.136.652,61
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				702.850.000		304.104.686,14		333.133.592		343.133.592		743.133.592

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala Barang Milik Daerah (BMD) Kelompok Aset Tetap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	14	702.850.000	14	304.104.686,14	14	333.133.592	14	343.133.592	14	743.133.592
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10		10		12		12		12	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		0		0		0		2	
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000		247.104.686,14		274.998.592		284.998.592		284.998.592

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10	250.000.000	10	247.104.686,14	12	274.998.592	12	284.998.592	12	284.998.592
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.850.000		57.000.000		58.135.000		58.135.000		58.135.000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	14	52.850.000	14	57.000.000	14	58.135.000	14	58.135.000	14	58.135.000
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000		0		0		0		400.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	400.000.000	0	0	0	0	0	0	2	400.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.308.554.970		1.957.860.350		1.963.551.610		1.969.811.996		2.021.909.479
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah (%)	100	100	2.308.554.970	100	1.957.860.350	100	1.963.551.610	100	1.969.811.996	100	2.021.909.479
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100		100		100		100		100	
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.110.681.270		1.110.681.270		1.110.681.270		1.110.681.270		1.110.681.270
Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	420	420	1.110.681.270	420	1.110.681.270	420	1.110.681.270	420	1.110.681.270	420	1.110.681.270
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	22	22		22		22		22		22	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				47.267.700		47.267.700		47.267.700		47.267.700			47.267.700
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	2	47.267.700	2	47.267.700	2	47.267.700	2	47.267.700	2		47.267.700
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				55.134.500		55.134.500		55.134.500		55.134.500			55.134.500

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	22	22	55.134.500	22	55.134.500	22	55.134.500	22	55.134.500	22	55.134.500
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				123.939.400		123.939.400		123.939.400		123.939.400		123.939.400
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	2	123.939.400	2	123.939.400	2	123.939.400	2	123.939.400	2	123.939.400
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				384.461.600		384.461.600		384.461.600		384.461.600		384.461.600
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	420	420	384.461.600	420	384.461.600	420	384.461.600	420	384.461.600	420	384.461.600
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				499.878.070		499.878.070		499.878.070		499.878.070		499.878.070

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	3	499.878.070	3	499.878.070	3	499.878.070	3	499.878.070	3	499.878.070
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				338.155.900		338.155.900		338.155.900		338.155.900		338.155.900
jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) yg berbasis elektronik yg data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	3	3	338.155.900	3	338.155.900	3	338.155.900	3	338.155.900	3	338.155.900
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				338.155.900		338.155.900		338.155.900		338.155.900		338.155.900

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	3	3	338.155.900	3	338.155.900	3	338.155.900	3	338.155.900	3	338.155.900
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				859.717.800		452.110.580		452.110.580		452.110.580		497.321.638
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2	2	859.717.800	2	452.110.580	2	452.110.580	2	452.110.580	2	497.321.638
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3			
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				54.482.800		27.980.580		27.980.580		27.980.580		30.778.638

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2	2	54.482.800	2	27.980.580	2	27.980.580	2	27.980.580	2	30.778.638
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				805.235.000		424.130.000		424.130.000		424.130.000		466.543.000
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	3	3	805.235.000	3	424.130.000	3	424.130.000	3	424.130.000	3	466.543.000
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				0		56.912.600		62.603.860		68.864.246		75.750.671

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang diimplementasikan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	0	0	3	56.912.600	3	62.603.860	3	68.864.246	3	75.750.671
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				0		56.912.600		62.603.860		68.864.246		75.750.671
Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	0	0	3	56.912.600	3	62.603.860	3	68.864.246	3	75.750.671
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.589.158.195,65		1.613.405.066,38		1.628.944.794,58		1.643.393.835,02		1.664.409.978,22

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	529.719.398,55	100	537.801.687	100	542.981.598	100	547.797.945	100	554.803.326
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				529.719.398,55		537.801.687		542.981.598		547.797.945		554.803.326
Persentase keselarasan Dokumen RENSTRA terhadap RPJMD dan Dokumen Renja terhadap RKPd pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5	5	529.719.398,55	5	537.801.687	5	542.981.598	5	547.797.945	5	554.803.326
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5	3		3		3		3		3	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	3		3		3		3		3	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5	5		5		5		5		5	
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				51.360.207,55		52.370.494		53.144.266		53.620.026		54.495.705
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	51.360.207,55	2	52.370.494	2	53.144.266	2	53.620.026	2	54.495.705

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				55.479.693		56.489.979		57.263.753		57.739.511		58.615.183
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5	5	55.479.693	5	56.489.979	5	57.263.753	5	57.739.511	5	58.615.183
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				106.969.943		107.980.229		107.743.718		109.229.763		110.105.433

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5	3	106.969.943	3	107.980.229	3	107.743.718	3	109.229.763	3	110.105.433
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				92.506.943		93.517.229		94.291.005		94.766.761		95.642.433
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5	5	92.506.943	5	93.517.229	5	94.291.005	5	94.766.761	5	95.642.433
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)				52.137.943		53.148.229		53.922.004		54.397.761		55.273.433

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	2	52.137.943	2	53.148.229	2	53.922.004	2	54.397.761	2	55.273.433
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				47.865.533		48.875.819		49.649.594		50.125.351		51.001.023
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4	47.865.533	4	48.875.819	4	49.649.594	4	50.125.351	4	51.001.023

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				69.179.943		70.190.229		70.964.004		71.439.761		72.315.433
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	3	69.179.943	3	70.190.229	3	70.964.004	3	71.439.761	3	72.315.433
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				54.219.193		55.229.479		56.003.254		56.479.011		57.354.683

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4	54.219.193	4	55.229.479	4	56.003.254	4	56.479.011	4	57.354.683
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	529.719.398,55	100	537.801.689,69	100	542.981.598,29	100	547.797.945,01	100	554.803.326
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				529.719.398,55		537.801.689,69		542.981.598,29		547.797.945,01		554.803.326
Persentase keselarasan Dokumen RENSTRA terhadap RPJMD dan Dokumen Renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	28	31	529.719.398,55	31	537.801.689,69	31	542.981.598,29	31	547.797.945,01	31	554.803.326
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	20	31		31		31		31		31	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	7	4		4		4		4		4	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	5		5		5		5		5	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	30	31		31		31		31		31	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	5		5		5		5		5	
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				53.152.896,55		75.330.000		82.863.000		82.863.000		75.330.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	53.152.896,55	2	75.330.000	2	82.863.000	2	82.863.000	2	75.330.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				40.652.460		45.431.500		45.431.500		48.446.048,46		43.426.138,55
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	30	31	40.652.460	31	45.431.500	31	45.431.500	31	48.446.048,46	31	43.426.138,55
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				75.330.000		75.330.000		82.863.000		82.863.000		75.330.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	28	31	75.330.000	31	75.330.000	31	82.863.000	31	82.863.000	31	75.330.000
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				52.678.000		52.678.000		58.965.019,29		63.740.380		63.740.380
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	20	31	52.678.000	31	52.678.000	31	58.965.019,29	31	63.740.380	31	63.740.380
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				137.292.542		105.351.610,69		82.863.000		80.796.799,55		100.413.929,45

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	7	4	137.292.542	4	105.351.610,69	4	82.863.000	4	80.796.799,55	4	100.413.929,45
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				41.678.500		45.433.500		52.678.000		63.740.850		63.740.850
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	5	41.678.500	5	45.433.500	5	52.678.000	5	63.740.850	5	63.740.850

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				75.330.000		84.640.079		84.640.079		82.863.000		82.863.000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	5	75.330.000	5	84.640.079	5	84.640.079	5	82.863.000	5	82.863.000
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				53.605.000		53.607.000		52.678.000		42.484.867		49.959.028

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	5	53.605.000	5	53.607.000	5	52.678.000	5	42.484.867	5	49.959.028
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	529.719.398,55	100	537.801.689,69	100	542.981.598,29	100	547.797.945,01	100	554.803.326,22
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				529.719.398,55		537.801.689,69		542.981.598,29		547.797.945,01		554.803.326,22
Persentase keselarasan Dokumen RENSTRA terhadap RPJMD dan Dokumen Renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	5	529.719.398,55	5	537.801.689,69	5	542.981.598,29	5	547.797.945,01	5	554.803.326,22

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2		2		2		2		2		3	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	3	2		2		2		2		2		3	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	3	2		2		2		2		2		3	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2		2		2		2		2		3	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	5		5		5		5		5	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	3	6		6		6		6		6	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	3	6		6		6		6		6	
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				44.822.000		45.508.000		45.945.000		46.354.000		46.947.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	44.822.000	2	45.508.000	2	45.945.000	2	46.354.000	3	46.947.000
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				47.842.000		48.574.000		49.040.000		49.476.000		50.109.000
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	3	2	47.842.000	2	48.574.000	2	49.040.000	2	49.476.000	3	50.109.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				51.182.000		51.965.000		52.464.000		52.931.000		53.609.000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	5	51.182.000	5	51.965.000	5	52.464.000	5	52.931.000	5	53.609.000
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				166.898.000		169.452.000		171.079.000		172.602.000		174.811.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	3	6	166.898.000	6	169.452.000	6	171.079.000	6	172.602.000	6	174.811.000
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				50.403.000		51.174.000		51.665.000		52.125.000		52.792.000
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	50.403.000	2	51.174.000	2	51.665.000	2	52.125.000	3	52.792.000
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				63.589.000		64.562.000		65.182.000		65.762.000		66.604.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	3	2	63.589.000	2	64.562.000	2	65.182.000	2	65.762.000	3	66.604.000
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				65.972.000		66.981.000		67.624.000		68.226.000		69.099.000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	5	65.972.000	5	66.981.000	5	67.624.000	5	68.226.000	5	69.099.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				39.011.398,55		39.585.689,69		39.982.598,29		40.321.945,01		40.832.326,22
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	3	6	39.011.398,55	6	39.585.689,69	6	39.982.598,29	6	40.321.945,01	6	40.832.326,22
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				349.492.991,53		354.825.445,51		358.242.994,01		361.420.675,35		366.042.615,82
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				279.594.393,53		283.860.356,41		286.594.395,2		289.136.540,28		292.834.092,82
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	100	279.594.393,53	100	283.860.356,41	100	286.594.395,2	100	289.136.540,28	100	292.834.092,82

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				0		41.151.088		41.793.556,2		91.151.088		91.151.088
Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	0	0	1	41.151.088	1	41.793.556,2	1	41.151.088	1	41.151.088
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				0		41.151.088		41.793.556,2		41.151.088		41.151.088
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	0	0	1	41.151.088	1	41.793.556,2	1	41.151.088	1	41.151.088
jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				0		0		0		50.000.000		50.000.000
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				100.000.000		192.709.268,41		204.800.839		127.985.452,28		160.403.820,82
Jumlah Hasil Kelitbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	192.709.268,41	0	204.800.839	0	127.985.452,28	0	160.403.820,82

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	0	1		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	0		1		0		0		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan					0		105.299.188,41		204.800.839		97.337.285		97.337.285
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	0	0	0	1	105.299.188,41	1	204.800.839	1	97.337.285	1	97.337.285	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				0		37.410.080			0		0		37.410.080
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	0	0	1	37.410.080	0	0	0	0	0	1	37.410.080
5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				50.000.000		0			0		30.648.167,28		0
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	30.648.167,28	0	0
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				50.000.000		0			0		0		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				0		50.000.000		0		0		25.656.455,82
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	0	1	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	25.656.455,82
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				179.594.393,53		50.000.000		40.000.000		70.000.000		41.279.184
Jumlah Inovasi yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	0	179.594.393,53	1	50.000.000	1	40.000.000	1	70.000.000	1	41.279.184
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				179.594.393,53		25.000.000		20.000.000		50.000.000		21.162.448
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1	179.594.393,53	1	25.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	21.162.448
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				0		25.000.000		20.000.000		20.000.000		20.116.736
Terseleenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	0	0	1	25.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.116.736
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				69.898.598		70.965.089,1		71.648.598,81		72.284.135,07		73.208.523
Meningkatnya Inisiasi Inovasi Daerah yang Ditetapkan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	69.898.598	100	70.965.089,1	100	71.648.598,81	100	72.284.135,07	100	73.208.523
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi				69.898.598		70.965.089,1		71.648.598,81		72.284.135,07		73.208.523

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan inovasi daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	1	69.898.598	1	70.965.089,1	1	71.648.598,81	1	72.284.135,07	1	73.208.523
	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	3		3		3		3		3	
	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				22.000.000		20.965.089,1		20.000.000		20.000.000		20.000.000
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	1	22.000.000	1	20.965.089,1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				22.898.598		25.000.000		25.648.598,81		26.284.135,07		26.208.523

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	1	22.898.598	1	25.000.000	1	25.648.598,81	1	26.284.135,07	1	26.208.523
5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi				25.000.000		25.000.000		26.000.000		26.000.000		27.000.000
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	3	25.000.000	3	25.000.000	3	26.000.000	3	26.000.000	3	27.000.000

TABEL 4.4
DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan
				5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

			5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
				5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
				5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan

				Koordinasi Musrenbang Kecamatan
				5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
				5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

				Daerah Bidang Infrastruktur
				5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
				5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
				5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
				5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

				Daerah Bidang Pemerintahan
				5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
				5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
			5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
				5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan

				Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
				5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
				5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
				5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
			5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
				5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Ditetapkan	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi
				5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi
				5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Sakip Kabupaten	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	30,47	33,26	34,73	35,01	35,78	36,03	
3	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	10,20	10,69	11,34	11,35	11,48	11,70	
4	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	10	10	10	10	10	10	
5	Nilai SAKIP PD	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	10	20	30	40	50	60	

Tabel 4.7
Rumusan Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Formulasi Data	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab										
1	Nilai SAKIP Kabupaten	<p>Nilai SAKIP Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Nilai tersebut menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja dalam manajemen pemerintah daerah.</p> <p>Formula Nilai SAKIP Kabupaten/Kota</p> <p>Nilai SAKIP = \sum (Skor Komponen x Bobot)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Komponen Penilaian</td> <td style="width: 30%;">Bobot (%)</td> </tr> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi</td> <td>25%</td> </tr> </table>	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Perencanaan Kinerja	30%	Pengukuran Kinerja	30%	Pelaporan Kinerja	15%	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25%	<p>Nilai SAKIP kabupaten adalah hasil pengukuran tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan orientasi hasil. Nilai ini diberikan berdasarkan evaluasi terhadap kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi internal.</p>	LHE AKIP Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	Bappeda Litbang
Komponen Penilaian	Bobot (%)														
Perencanaan Kinerja	30%														
Pengukuran Kinerja	30%														
Pelaporan Kinerja	15%														
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25%														
2	Indeks Inovasi Daerah	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><u>Nilai IID</u></td> <td style="width: 70%; text-align: center;"><u>Kategori</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≥ 60</td> <td style="text-align: center;">Sangat Inovatif</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40-59,99</td> <td style="text-align: center;">Inovatif</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">< 40</td> <td style="text-align: center;">kurang Inovatif</td> </tr> </table>	<u>Nilai IID</u>	<u>Kategori</u>	≥ 60	Sangat Inovatif	40-59,99	Inovatif	< 40	kurang Inovatif	<p>Untuk mengukur indeks inovasi daerah menggunakan pendekatan kuantitatif baik provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Kemendagri melalui Badan Strategi kebijakan dalam Negeri (BSKDN)</p>	Kemendagri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)	Bappeda Litbang		
<u>Nilai IID</u>	<u>Kategori</u>														
≥ 60	Sangat Inovatif														
40-59,99	Inovatif														
< 40	kurang Inovatif														
3.	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan	<p>Formula indeks kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran biasanya</p>	<p>Indeks kesesuaian perencanaan dan penganggaran adalah ukuran</p>	Dokumen Perencanaan RKP	Bidang PPE Bidang PPM										

No	Indikator Kinerja	Formulasi Data	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	dan Penganggaran	<p>digunakan untuk mengukur sejauh mana dokumen perencanaan (RKPD, Renja dan RPJMD) selaras atau sesuai dengan dokumen penganggaran (RKA, APBD)</p> <p>Formula Indeks kesesuaian perencanaan dan penganggaran</p> $IKPP = \frac{\text{Jumlah Program RKPD}}{\text{Jumlah Program APBD}} \times 100$	kuantitatif yang menunjukkan tingkat keselarasan antara kegiatan/program yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, Renja PD, RPJMD) dengan kegiatan/Program yang dianggarkan dalam dokumen penganggaran (RKA, APBD)	Dokumen Penganggaran (DPA APBD)	Bidang PSDA Bidang IK
4.	Persentase Produk inovasi yang dimanfaatkan	<p>Rumus Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan biasanya digunakan untuk mengukur seberapa banyak produk inovasi yang telah dikembangkan benar-benar digunakan atau dimanfaatkan oleh target pengguna.</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah Produk Inovasi yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah total Produk Inovasi yang dihasilkan}} \times 100$	Perbandingan antara jumlah produk hasil inovasi yang digunakan/dimanfaatkan secara nyata oleh pengguna (internal maupun eksternal), terhadap total jumlah produk inovasi yang dihasilkan dalam periode tertentu.	OPD Masyarakat	Bidang PPID
5.	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP PD dihitung berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Nilai tersebut menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja dalam manajemen Perangkat daerah.	Nilai SAKIP PD adalah hasil pengukuran tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan prinsip efesiensi,	LHE AKIP Bappeda Litbang oleh Inspektorat	Sekretaris Bidang PPE Bidang PPM Bidang PSDA Bidang IK

No	Indikator Kinerja	Formulasi Data	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab										
		<p>Formula Nilai SAKIP Perangkat Daerah</p> <p>Nilai SAKIP = \sum (Skor Komponen x Bobot)</p> <table data-bbox="454 470 1095 730"> <thead> <tr> <th>Komponen Penilaian</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Perencanaan Kinerja	30%	Pengukuran Kinerja	30%	Pelaporan Kinerja	15%	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25%	<p>efektifitas, dan orientasi hasil. Nilai ini diberikan berdasarkan evaluasi terhadap kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi internal.</p>		Bidang PPID
Komponen Penilaian	Bobot (%)														
Perencanaan Kinerja	30%														
Pengukuran Kinerja	30%														
Pelaporan Kinerja	15%														
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25%														

Tabel 4.8
Rumusan Formulasi Data IKK PD

No	Indikator Kinerja	Formulasi Data	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	·(Jumlah program prioritas yang di dukung program daerah dibagi jumlah program prioritas nasional) x 100	Indikator ini digunakan mengukur tingkat kontribusi dan keselarasan program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen RPJMD Dokumen RKPD	Bappeda Litbang
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	·(Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah dibagi Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terkait dengan pembangunan daerah) x 100	Indikator ini digunakan untuk mengukur dan menilai sejauh mana rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar digunakan atau diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.	Dokumen RPJMD Dokumen RKPD Laporan Pelaksanaan Riset Daerah	Bappeda dan Litbang

BAB V PENUTUP

Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra Bappeda Litbang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

a. Catatan Penting

1. Penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renstra Bappeda Litbang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kinerja layanan urusan pemerintahan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
3. Permasalahan dan Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;

b. Kaidah Pelaksanaan

1. Renstra Bappeda Litbang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD dan akan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Litbang. Perubahan berdasarkan hasil

pembahasan bersama DPRD Kabupaten Nunukan.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Memastikan kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusi, sumber pendanaan serta komitmen semua unsur
2. Melaksanakan sosialisasi dokumen Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan kepada seluruh pegawai, mitra kerja, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi untuk menjamin dan memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Litbang yang dilaksanakan setiap tahunnya . Dalam hal ini Renstra menunjukkan perlu dilakukan penyesuain terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Melalui Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025- 2029 diharapkan menjadi pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkup urusan bidang perencanaan pembangunan dan dibidang riset dan inovasi daerah sehingga dapat memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat, Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Nunukan.

Nunukan, September 2025
Kepala Bappeda Litbang

Drs.Raden Iwan Kurniawan,M.A.P
Pembina Utama Muda,IV/c
NIP. 19670903 199303 1 008

POHON KINERJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN NUNUKAN 2025-2029

